



**KESIAPAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA MENJADI
DAERAH PENYANGGA (HINTERLAND) KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI
CALON IBUKOTA NEGARA**

Bambang Supriyanto¹

Fitri Nurmahmuda²

Annisa Qomariah³

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
bambang2107046043@webmail.uad.ac.id

Abstract

Readiness of Samarinda City as a buffer area (hinter land) of East Kalimantan Province in terms of Education Infrastructure in welcoming the National Capital in 2024. This study uses a qualitative confirmatory approach. This research departs from an established and formal theory as a basis for making decisions. Data collection techniques, namely interviews and documentation. This study specifically discusses regional strengthening, especially the city of Samarinda as a buffer for the candidate for the state capital in East Kalimantan, this study is very important because the existence of the State Capital must receive support from the surrounding buffer areas, in terms of Currently, the cities that serve as other buffer zones are the City of Sepaku, North Penajam Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency, Balikpapan City and Tanah Grogot City, Paser Regency. To strengthen the existence of buffer zones, especially the city of Samarinda, of course there must be a strategy that is applied, namely strengthening of capability and capacity (capacity building) which is carried out through the development of educational infrastructure, economic infrastructure, defense and security, politics, social, culture and local wisdom that applies throughout the country. East Kalimantan. From the description above, the big role of the buffer zone/hinter land can be described as follows: (1) Center for economic growth (2) Center for defense and security (3) Center for settlements (4) Center for food security (5) Center for education (6) Center for Agriculture (7) Plantation center (8) Fishery center (9) Industry center (10) Trade center (11) Growth center for growing area (12) Transportation center (13) Health center (14) Hygiene center (15) Recreation center And others. At a macro level, that Samarinda City as a buffer area is actually not ready to make Samarinda as a buffer zone for the state capital and efforts are needed to welcome the state capital, especially Samarinda city as a hinter land area/buffer area so that it can really contribute to development in all fields, especially education.

Keywords: *Relocation of the State Capital (IKN), Education Infrastructure*

Article Info

*Naskah
Diterima :
2022-06-01*

*Naskah
Direvisi:
2022-06-18*

*Naskah
Disetujui:
2022-06-27*

Abstrak

Kesiapan Kota Samarinda Sebagai daerah penyangga (hinter land) Provinsi Kalimantan Timur dari sisi Infrastruktur Pendidikan dalam menyongsong Ibukota Negara pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat konfirmasi. Penelitian ini berangkat dari teori yang sudah mapan dan formal sebagai dasar untuk membuat keputusan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi Penelitian ini secara khusus membahas tentang penguatan-penguatan daerah terutama kota Samarinda sebagai penyangga calon Ibukota negara di Kalimantan Timur, kajian ini sangat penting karena keberadaan Ibukota Negara harus mendapat dukungan dari daerah-daerah penyangga di sekitarnya, dalam hal ini kota-kota yang menjadi daerah penyangga lainnya adalah Kota Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kota Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Untuk memperkuat keberadaan daerah penyangga terutama kota Samarinda tentu harus ada strategi yang diterapkan, yakni penguatan kapabilitas dan kapasitas (capacity building) yang dijalankan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi, pertahanan keamanan, politik, social, budaya dan juga kearifan lokal yang berlaku di seluruh Kalimantan Timur. Dari uraian di atas, begitu besar peran daerah penyangga/ hinter land dapat dideskripsikan sebagai berikut : (1) Pusat pertumbuhan ekonomi (2) Pusat pertahanan keamanan (3) Pusat permukiman (4) Pusat ketahanan pangan (5) Pusat Pendidikan (6) Pusat Pertanian (7) Pusat perkebunan (8) Pusat Perikanan (9) Pusat Industri (10) Pusat Perdagangan (11) Pusat Pertumbuhan wilayah/ wilayah tumbuh (12) Pusat transportasi (13) Pusat Kesehatan (14) Pusat Kebersihan (15) Pusat rekreasi Dan lain-lain. Secara makro, bahwa Kota Samarinda sebagai daerah penyangga sesungguhnya belumlah siap menjadikan Samarinda sebagai daerah penyangga Ibukota negara dan diperlukan usaha untuk menyongsong Ibukota negara khususnya kota Samarinda sebagai daerah hinter land/ daerah penyangga agar benar-benar berkontribusi dalam pembangunan di segala bidang, terutama bidang pendidikan.

Kata Kunci : *Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Infrastruktur Pendidikan*

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai calon ibukota negara, Rencana pemindahan Ibukota negara sudah sejak lama, dan penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara sudah tepat, karena letaknya yang strategis berada di tengah-tengah negara kita, sebuah tatanan kehidupan yang luar biasa dinamis, baik dari bidang ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan, tentu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk menyukseskan proses pemindahan Ibukota Negara. Sebuah tatanan kehidupan yang sangat majemuk, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk menyukseskannya, termasuk mempersiapkan infrastruktur pendidikannya. Sementara itu Kota Samarinda sebagai hinter land (Daerah Penyangga) Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara seyogyanya harus mempersiapkan diri untuk menyongsongnya, secara khusus pada penyediaan sarana dan prasarana terkait infrastruktur pendidikan.

Usulan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan Kota Jakarta. Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya, hanyalah sisi kecil dari landasan usulan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah sangat penting, oleh karenanya harus dilihat sebagai penanda bahwa persoalan sebenarnya di Kota Jakarta sudah terlampaui berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir. Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan ini adalah usulan konkrit untuk membalik paradigm pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah (Chaniagoet. al, 2008).

Wacana pemindahan ibu kota negara telah dibahas bersama presiden Republik Indonesia Joko Widodo di istana negara. Hal ini menunjukkan bahwa mulai ada upaya serius

dari pihak pemerintah pusat untuk melakukan kajian terhadap proses pemindahan ibu kota negara mengingat daya dukung sosial dan lingkungan di Kota Jakarta saat ini sudah dianggap tidak layak (Shalih, 2018).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (2019) menyebutkan bahwa ada 7 syarat dari pertimbangan dalam menentukan wilayah Ibu Kota Negara. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah Indonesia Timur. (2) Tersedia lahan yang luas milik pemerintah/BUMN perkebunan untuk mengurangi investasi. (3) Lahan harus bebas bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, erosi, serta kebakaran hutan. (4) Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan. (5) Dekat dengan kota eksisting yang telah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. (6) Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal. (7) Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Setelah melewati proses kajian yang panjang, pemerintah akhirnya mengambil keputusan besar untuk memilih dan menetapkan wilayah calon Ibu Kota Negara. Dari berbagai wilayah yang menjadi spekulasi publik, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara akhirnya dipilih oleh pemerintah. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kajian yang berkesimpulan bahwa region yang dipilih adalah wilayah yang paling potensial dan ideal menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara. (Sahamony, 2018).

Pemindahan lokasi Ibu Kota merupakan upaya relokasi atau menciptakan ruang dan wilayah baru sebagai lokasi berdirinya komponen-komponen pusat pemerintahan untuk menggantikan ruang dan wilayah sebelumnya. Kebijakan pemindahan Ibu Kota

dari suatu wilayah ke wilayah lain menjadi keputusan yang besar, karena membutuhkan kesiapan institusi, masyarakat, dan dana yang cukup banyak (Aurumbita, 2015).

Berdasarkan prediksi dari BPS Kota Samarinda dan sebagai daerah pusat pemerintahan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur akan mendapat bonus demografi dan jumlah penduduk yang bertambah secara signifikan, diperkirakan 5 juta sampai 6 juta penduduk akan berbondong-bondong ke Kalimantan Timur, hal ini menjadi tantangan masyarakat Kalimantan Timur khususnya di bidang Pendidikan. Hal-hal yang sangat mendesak untuk segera diwujudkan adalah kuantitas dan kualitas sekolah harus segera dibangun di seluruh wilayah Kalimantan Timur, Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), beserta seluruh perangkatnya. Manajemen Sarana dan prasarana sekolah, manajemen kurikulum : mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian kurikulum sedangkan untuk manajemen tenaga kependidikan (guru dan personalia) : perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, kompensasi dan penilaian pegawai. kompetensi guru, untuk manajemen kesiswaan berfokus pada penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, manajemen kesiswaan mengacu pada penerima siswa baru, kegiatan kemajuan belajar siswa, dan bimbingan dan pembinaan disiplin siswa, serta tata kelola keuangan yang baik mengacu pada terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan.

Tata kelola keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, aturan dan program berkenaan dengan tata kelola keuangan, anggaran pendidikan, dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi layanan pendidikan. Dalam pemikiran Rofik A (2017) menjelaskan bahwa dana pendidikan (uang) merupakan sumber daya yang terbatas, oleh karena itu perlu dikelola

dengan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Manajemen keuangan dan pembiayaan merupakan sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam tatakelola keuangan berfokus pada mekanisme anggaran, mekanisme akuntansi keuangannya, pembelanjaan, pergudangan, dan pendistribusiannya, mekanisme investasi dan mekanisme pemeriksaannya. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan dapat berperan dalam mengisi Pembangunan. Agar pendidikan bermutu ditentukan oleh banyak factor salah satunya adalah pembiayaan yang terintegrasi dalam tata kelola keuangan satuan pendidikan.

Perlu adanya kesiapaan dan antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, maupun media yang berperan penting dalam membangun persepsi dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang lebih kita kenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) (Supriyatno, 2018).

Beberapa kendala yang dihadapi Sekolah-sekolah di kota Samarinda, Kalimantan Timur umumnya adalah minimnya infrastruktur pendidikan, sumber daya keuangan yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah, topografi, dan medan yang cukup berat untuk terwujudnya pemerataan pendidikan, beberapa gedung sekolah kondisi rusak, letaknya jauh dan terpencil, bahkan ada beberapa sekolah tingkat menengah yang masih menumpang, pembiayaan sekolah yang tidak berimbang dengan kebutuhan, hal ini menjadi ironi di tengah hiruk pikuknya pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya yang dialami Jakarta,

hanyalah sisi kecil dari dasar pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah amat penting, karena ia harus dilihat sebagai penanda bahwa sebenarnya persoalan di Ibu Kota Jakarta sudah terlampaui berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir. Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini adalah usulan kongkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah (Saputra, 2021).

Berdasarkan data dari bidang aset dan perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Masih banyak sekolah negeri di Samarinda masih numpang antara lain; SMA Negeri 13 Samarinda sebagian masih menumpang di SMK Negeri 7 Samarinda, SMA Negeri 14 Samarinda masih menumpang di gedung SMP Negeri Loa Bakung, SMA Negeri 15 Samarinda sebagian besar gedungnya terbakar, SMA Negeri 16 Samarinda masih menumpang di gedung Dinas Tenaga Kerja karena saat ini bersengketa dengan SDN di Prewab Samarinda, SMA Negeri 17 Samarinda masih menumpang di SD Samarinda Seberang, dan masih banyak sekolah-sekolah di Samarinda yang masih minim dari sisi sarana dan prasarana pendidikannya.

Dari segi kesiapan infrastruktur pendidikannya Kota Samarinda sebagai daerah penyangga sesungguhnya belum siap, Hal ini dapat terlihat dari minimnya unit-unit sekolah baru yang seharusnya segera dibangun untuk menyongsong Ibukota negara. Hal ini sangat ironik ketika Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat konfirmasi. Penelitian ini berangkat dari teori yang sudah mapan dan formal sebagai dasar untuk membuat keputusan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari kepala sekolah, Guru/Waka Kesiswaan, Guru/Waka Sapas. Lokasi penelitian dilakukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Pedoman dalam pengambilan data yaitu melalui survei, observasi, dan wawancara.

Prosedur Analisis Data:

1. Pengumpulan Data

Wawancara yang dilakukan dengan tatap dengan mekanisme Tanya jawab antara peneliti dan informan. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap kajian obyek dengan menggunakan pengindraan. Dan *Focus Group Discussion* yaitu dengan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah dalam suasana informal.

2. Reduksi Data

Penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perludata sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data/ Display Data

Dengan melihat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami antara lain : Catatan Lapangan, Grafik, Tabel, Bagan sehingga data dapat diorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang saling berkaitan dan mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data

Melihat hasil reduksi data tetapi tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tujuannya adalah untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencarhubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

C. HASIL PENELITIAN

yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan (Saputra, 2021). Dengan kata lain, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur perlu memperhatikan sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, dan pemerataan kualitas pendidikan yang baik sehingga perlu adanya kesiapan yang matang dengan melibatkan masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Dengan melihat arti pentingnya daerah penyangga terutama kota Samarinda, maka diperlukan peningkatan kapabilitas dan kapasitasnya agar nantinya benar-benar siap untuk menyokong Kalimantan Timur sebagai Ibukota negara, hal ini diperlukan kerjasama yang baik dan kolaborasi mumpuni terkait pembangunan terus menerus dan berkelanjutan di daerah-daerah penyangga, tidak hanya di Samarinda, tetapi juga di daerah-daerah lain. Pemerintah kota Samarinda harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota lain, bersinergi dengan pemerintah pusat, dan juga bersinergi dengan Badan Otonom Ibukota Negara. Masih ada waktu untuk menyongsong Ibukota negara, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pemindahan Ibukota negara haruslah kerja keras, kerja cerdas dan kerja nyata agar program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya, mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul dan kompleks dalam kaitan pembangunan Ibukota negara.

Disamping itu untuk memperkuat keberadaan daerah penyangga terutama kota Samarinda tentu harus ada strategi yang diterapkan, yakni penguatan kapabilitas dan kapasitas (*capacity building*) yang dijalankan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi, pertahanan keamanan, politik, social, budaya dan juga kearifan lokal yang berlaku di seluruh Kalimantan Timur.

Begitu juga dengan kran investasi harus dibuka lebar untuk sector-sektor strategis dan dasar misalnya sector pertumbuhan industry

kecil. Industry menengah dan besar, perdagangan kecil, menengah dan besar, industri pendidikan, industry pariwisata serta tidak kalah penting adalah industry kreatif yang biasanya dilakukan oleh kalangan milenial.

Dari uraian di atas, begitu besar peran daerah penyangga/ hinter land dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pusat pertumbuhan ekonomi
2. Pusat pertahanan keamanan
3. Pusat permukiman
4. Pusat ketahanan pangan
5. Pusat Pendidikan
6. Pusat Pertanian
7. Pusat perkebunan
8. Pusat Perikanan
9. Pusat Industri
10. Pusat Perdagangan
11. Pusat Pertumbuhan wilayah/ wilayah tumbuh
12. Pusat transportasi
13. Pusat Kesehatan
14. Pusat Kebersihan
15. Pusat rekreasi
16. Dan lain-lain masih banyak lagi, dan perlu kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sarana pembelajaran juga telah diupayakan agar semaksimal mungkin berkualitas dengan memperhatikan ruangan penunjang pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang diberikan juga telah diupayakan dapat memenuhi standar yang ada melalui penggunaan kurikulum merdeka di dalam pembelajarannya. Kemudian sekolah juga berupaya membangun fasilitas penunjang pembelajaran lainnya sehingga dapat memenuhi standar pendidikan yang ada terutama dalam

pembangunan fasilitas kelas akan dilakukan kembali untuk membangun sekolah yang lebih maju berdasarkan dengan IKN. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Shalih, (2018) yaitu sarana penunjang dan sumber daya merupakan faktor vital dalam kemajuan sebuah daerah sehingga potensi dan

kemampuan setiap manusia yang ada di dalamnya akan menentukan keberhasilan atau tidaknya program pembangunan yang ada.

E. KESIMPULAN

1. Secara makro, bahwa Kota Samarinda sebagai daerah penyangga sesungguhnya belumlah siap masih diperlukan usaha keras untuk menjadikan Samarinda sebagai daerah penyangga Ibukota negara.

2. Diperlukan usaha nyata dan luar biasa untuk menyongsong Ibukota negara khususnya kota Samarinda sebagai daerah hinter land/ daerah penyangga agar benar-benar berkontribusi dalam pembangunan di segala bidang, terutama bidang pendidikan.

3. Masyarakat Samarinda berhak untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu, karena sesungguhnya pendidikan itu hak warga negara dan harus dapat diakses untuk semua orang sebagai warga bangsa.

F. DAFTAR PUSTAKA

Aurumbita, Yuke Nori. 2015. "Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Bappenas. 2019. "Kajian Awal Aspek Sosial IKN." Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Bappenas. 2019. "Pemindahan Ibu Kota Negara. Disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dalam Dialog Nasional I: Pemindahan Ibu Kota Negara (16 Mei 2019)."

Chaniago, dkk. 2008. Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan. Jakarta: Tim Visi Indonesia 2033.

Muta'ali, Luthfi dan Sahamony, Anugerah. 2019. Pemindahan Ibu Kota Tinjauan Geografis. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) UGM.

Paramananda, Damar, dan Muta'ali, Luthfi. "Analisis Kesiapan Wilayah Calon

Lokasi Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara."

Sahamony, Anugerah A. 2018. "Tinjauan Geografis Wilayah Potensial Ibu Kota Negara Indonesia." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Saputra, dkk. 2021. "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara) Strategy Analysis Relocation Of The Capital Cit," Jurnal Ekonomi Pertahanan, 7, hal. 192.

Shalih, dkk. 2018. "Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), hal. 21.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.